

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, pengawas dari sisi anggaran serta membuat prioritas lokasi mana yang akan dibeli berdasarkan proposal atau penawaran yang masuk, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan RTH Publik tunduk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena UU Pengadaan Tanah tersebut memberikan kemungkinan untuk lahan yang kurang dari 5000 m² dilakukan dengan cara jual beli. Tanah

tersebut dibeli pemerintah untuk pengadaan RTH bagi keperluan masyarakat sekitar. RTH di Kota Yogyakarta baik itu RTH Publik maupun RTH Privat belum merata, hal tersebut dikarenakan lahan yang terbatas dan harga lahan yang mahal maka Kota Yogyakarta kesulitan dalam memenuhi proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Secara umum Kota Yogyakarta sudah memenuhi standar minimal Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kota yaitu 30 persen, akan tetapi pada realitanya tidak seimbang antara proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan;
 - b. harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta;
 - c. dana masih terbatas sehingga pembangunan RTH menjadi terbengkalai;
 - d. masyarakat kurang menyadari akan arti pentingnya RTH;
 - e. belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;
 - f. sulitnya mendapatkan air kualitas baik karena air tanah yang di RTH selalu kehabisan karena disedot hotel dengan mesin yang tinggi;

- g. banyaknya sampah yang dibuang ke TPS akan mengganggu penduduk sekitar, seperti terjadinya pencemaran udara dan kesehatan juga terganggu;
- h. tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik tanah.

B. Saran

Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memaksimalkan pembangunan dalam Ruang Terbuka Hijau Publik di kecamatan-kecamatan yang kepadatan penduduknya masih rendah agar dapat menambah luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan atau mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustin, Risa, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serbaya Jaya, Surabaya.
- F. X. Sumarja, 2008, *Hukum Tata Guna Tanah Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2013, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta.
- Nasution, S, 2002, *Metode research: (Penelitian ilmiah)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Nuasa, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syah, Mudakir Iskandar Syah, 2014, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta.

JURNAL

- Sendy Longaris, Octavianus H.A Rogi, dan Esli D. Takumansang, 2019, "Identifikasi dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka di Kecamatan Wenang Kota Manado", *Jurnal Spasial*, Vol. 6, Nomor 3, Program Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Totok Dwinur Haryanto, 2009, "Model Penatagunaan Tanah Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.8, Nomor 2, Dosen Fakultas Hukum UNISRI
- Wahidatul Rizqi Firianti, 2019, "Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sungai Winongo Di Kricak Kota Yogyakarta", *Jurnal Noken*, Vol. 5, Nomor 2, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TESIS

- Andhi Mahligai, 2013, *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ashari, 2018, *Analisis Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dalam Rangka Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Malang "Kota Sehat Dan Ramah*

Lingkungan”, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang.

Darwin Parlaungan Lubis, 2018, *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Menuju Pembangunan Kota Hijau (Studi Kasus Di Kota Medan)*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara, RepublikIndonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pemerintah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2. Sekretariat Daerah, Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5. Sekretariat Daerah, Kota Yogyakarta

Keputusan Walikota Nomor 401 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau Di Kota Yogyakarta

INTERNET

KKP, Perspektif Ekologi Manusia Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/26012-perspektif-ekologi-manusia-dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam>, diakses pada 15 September 2020.

Admin BPKP, <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/profil-kota-yogyakarta>, diakses pada Kamis, 2 Desember 2021.

Admin DPU, Ruang Terbuka Hijau, <https://dpu.kulonprogo.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau>, diakses pada Sabtu, 24 September 2021.

Kiki Hidayat, Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/248452-analisis-ruang-terbuka-hijau-publik-di-k-0c0cc35a.pdf>, diakses pada Rabu, 29 September 2021.



| No. | REKAMPTAN | ISIPAKI | Jumlah | LUMBUK (ml) | | | | | | | | | | | | Total | Rincian Oleh |
|--|------------|---------|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | |
| 1 | Negeri | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk |
| 2 | Ditanggung | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 3 | Korban | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 4 | Korupsi | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Sekel Persegi panjang RTHP DUM | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 5 | Majlis | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 6 | PKL/Arak | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 7 | Ged. Kewan | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 8 | Mastigrah | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 9 | MUI | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 10 | Ged. Kewan | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 11 | Umbulharjo | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 12 | Ngeloge | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 13 | Dewantara | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| 14 | Widyadarm | 1 | 00 | | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | |
| | | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | Subsidi Permingan Jalan BLR Kota Yk | | |
| Total Luasan RTHP Publik Tahun 2013-2021 (ml) | | | | 5137 | 373 | 6713 | 2318 | 8220 | 852 | 2152 | 453 | 310 | 24692 | | | | |
| Total Jumlah Pembangunan RTHP Bngg. Perumahan Tahun 2013-2021 (unit) | | | | 14 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 50 | | | | |

Keterangan: Data RTH Publik Per November 2021

